



MANIFESTO

Manusia Indonesia Merdeka

“Berpikir Merdeka, Bersikap Merdeka, Bertindak Merdeka”

Bali, 28 Januari 2026

Lebih dari delapan dekade setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi satu pekerjaan besar yang belum selesai: **membebaskan diri dari kolonialisme mental**. Kemerdekaan politik sudah diperoleh dan penjajahan fisik memang telah berakhir. Tetapi kemerdekaan batin belum sepenuhnya hidup dalam diri rakyatnya. Ini bukan sekadar masalah sejarah melainkan masalah pembentukan manusia merdeka. Proklamasi adalah peristiwa politik, tetapi manusia merdeka adalah proses peradaban. Proklamasi memutus rantai kekuasaan, tetapi tidak otomatis memutus rantai mental. Ternyata kemerdekaan politik tidak otomatis melahirkan manusia merdeka.

Warisan paling berbahaya dari kolonialisme yang sudah berlangsung jauh sebelum bangsa dan Negara Indonesia terbentuk, justru terus hidup dan beroperasi dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak sebagian besar elite maupun warga bangsa. Warisan itu adalah perbudakan mental-kejiwaan. Padahal, mental-kejiwaan adalah pusat eksistensi manusia. Dari sanalah lahir kemampuan untuk berpikir, mengingat, menalar, membayangkan masa depan, mengambil keputusan, dan mengarahkan tindakan kolektif.



Penjajahan yang berlangsung lama telah merusak pusat eksistensi manusia ini: mematikan kepercayaan diri, mengikis kemandirian, dan mencabut manusia dari akar sejarah serta ruang hidupnya. Ketika mental manusia terpasung, kemerdekaan politik menjadi rapuh dan kemajuan ekonomi kehilangan arah moral.

Aliansi Kebangsaan memandang bahwa mental kaum terjajah masih bercokol kuat. Hingga hari ini, manusia-bangsa Indonesia masih kerap memperlihatkan gejala kurang percaya diri, rasa rendah diri kolektif, lemah pendirian, dan miskin kemandirian. Mentalitas ini mendorong dua kecenderungan ekstrem yang sama-sama berbahaya. Pertama, mental peniru dan pembebek, yang menjadikan bangsa ini konformis, tunduk pada selera global, dan kehilangan keberanian untuk menentukan jalan sendiri. Kedua, mental pecundang dan totalitarian, yang terbiasa menuruti kehendak kekuasaan, menormalisasi ketidakadilan, dan membenarkan penindasan atas nama stabilitas.

Setelah 1945, Indonesia juga mewarisi sistem pendidikan kolonial yang menekankan hafalan, bukan nalar. Membentuk pegawai, bukan warga negara. Mengajarkan kepatuhan, bukan keberanian moral. Akibatnya, generasi demi generasi tumbuh tanpa *agency*, tanpa kemampuan bertanya “mengapa”, tanpa keberanian mengambil keputusan.

Banyak kebijakan pasca-kemerdekaan justru memperkuat pola sentralisasi kekuasaan, ketergantungan pada birokrasi, budaya patronase. Rakyat tidak dibangun sebagai subjek, tetapi sebagai objek pembangunan. Akibatnya, rakyat tidak merasa memiliki Negara, mereka hanya “mengikuti”.

Secara politik, negara Indonesia sudah terbentuk, namun bangsa Indonesia terus berproses. Pendek kata, **Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah selesai (*state of being*), melainkan proses menjadi (*state of becoming*)**. Para pendiri bangsa sesungguhnya telah mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia belum selesai. Pada pidato 17 Agustus 1956, Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Indonesia telah melewati **fase revolusi fisik dan bertahan hidup, tetapi masih menghadapi satu tantangan besar, yaitu fase investasi**, terutama *mental investment*. Bung Karno menegaskan bahwa investasi keterampilan dan material tidak akan menghasilkan persatuan dan kemakmuran tanpa investasi mental. **Tanpa kekayaan mental, pembangunan justru melanggengkan perbudakan dalam bentuk baru.**

Namun, peringatan para pendiri negara-bangsa itu diabaikan. Rezim secara reguler berganti, tetapi orientasi pembangunan tetap bertumpu pada investasi material, pertumbuhan ekonomi, dan proyek-proyek fisik. Pembangunan mental-kultural dikesampingkan, kebudayaan diperlakukan sebagai pelengkap, dan manusia direduksi menjadi angka statistik. Akibatnya, mimpi kemerdekaan pascakolonial terus terinfeksi mentalitas konformis, pecundang, dan otoritarian, bahkan ketika kekuasaan diperoleh melalui mekanisme demokratis.

Mental kolonial ini menjelma dalam praktik penjajahan gaya baru. Jika kolonialisme lama merampas ruang melalui klaim “tanah tak bertuan” (*terra nullius*), kolonialisme pascakolonial merampas “ruang hidup rakyat atas nama investasi dan pembangunan.” Tanah adat, hutan, pesisir, dan kampung warga disingkirkan seolah-olah ruang itu tak bertuan. Negara yang seharusnya melindungi warga justru sering bertindak sebagai fasilitator perampasan. Masa depan Indonesia diperlakukan sebagai “waktu tak bertuan” (*tempus nullius*). Demi keuntungan jangka pendek, elite ekonomi dan politik bersekongkol merusak lingkungan, menguras sumber daya alam, menumpuk hutang, dan mengabaikan pembangunan kapabilitas manusia. Beban kerusakan, penderitaan, dan krisis diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam konteks itu, Indonesia kini terjebak dalam ‘kejangka-pendekan’ (*short-termism*) kronis. Politik dikurung dalam siklus lima tahunan, kebijakan ditentukan oleh kepentingan elektoral, dan visi jangka panjang dikorbankan demi popularitas sesaat. Dalam bisnis, pertumbuhan dikejar dengan merusak lingkungan. Dalam bermedia, viralitas mengalahkan tanggung jawab.

Berangkat dari premis bahwa bangsa merdeka hanya dapat dibangun oleh manusia yang merdeka, maka Indonesia kini harus membangun manusia Merdeka untuk masa depan melalui pembebasan batin sebagai proyek kebangsaan. **Manusia Merdeka seharusnya mampu berpikir melampaui kedaruratan sesaat. Manusia merdeka bukan hanya *homo sapiens* yang tahu, tetapi juga *homo imaginatus* yang mampu membayangkan dan merancang masa depan.** Kemampuan mengingat masa lalu dan memproyeksikan masa depan adalah keunggulan utama manusia atas makhluk lain. Tanpa kapasitas ini, manusia dan bangsa akan terus tersandung dalam kerangkeng waktu yang sama.

Aliansi Kebangsaan meyakini bahwa berpikir, bersikap dan bertindak merdeka adalah agenda strategis manusia Indonesia Merdeka. Manusia Indonesia Merdeka adalah manusia yang mampu menguasai diri, berdiri sendiri, dan mengabdikan kapabilitasnya bagi kebaikan bersama dalam kebangsaan Indonesia.

Dalam Pendidikan, diperlukan agenda belajar merdeka pada tiga bentuk “berpikir, bersikap, dan bertindak” untuk membangun kepribadian Merdeka. Pendidikan harus diarahkan untuk belajar Merdeka, untuk membangun manusia yang berkepribadian, berdaulat dalam berpikir, dan mandiri dalam bertindak –olah pikir, rasa, karsa, dan raga, agar menjadi manusia Merdeka.

Politik mestinya juga diarahkan untuk memberi ruang partisipasi setara dan menolak dominasi oligarki maupun mayoritarianisme identitas. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi prosedur elektoral tanpa substansi moral. Sebagaimana diingatkan Bung Karno, politik adalah perjuangan semua untuk semua, bukan alat segelintir elite.

Di bidang ekonomi, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kemandirian dan kerja sama, bukan ketergantungan dan eksploitasi. Semangat kooperatif yang digagas Bung Hatta—berbasis tolong-menolong, tanggung jawab bersama, dan kepercayaan diri kolektif—harus kembali menjadi jiwa perekonomian nasional.

Pada akhirnya, kemerdekaan sejati tidak diukur dari klaim dan seremoni, tetapi dari praktik nyata. Bangsa Indonesia hanya sungguh-sungguh merdeka ketika ia mempraktikkan kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membangun kemerdekaan Manusia dan Bangsa Indonesia, Aliansi Kebangsaan mengajukan beberapa narasi dan program kebangsaan Indonesia sebagai berikut.

- 1. Gagasan keindonesiaan merupakan solusi perjuangan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan perjuangan lokal dan parsial dalam memerangi penjajahan eksternal di masa lalu.** Pada masa kini dan di masa depan, gagasan keindonesiaan harus terus dikuatkan untuk melawan setiap agenda politik untuk menjauhkan kita semua dari cita-cita proklamasi kemerdekaan.
- 2. Pembangunan manusia dan bangsa Indonesia Merdeka membutuhkan tiga modal utama, yaitu modal spiritual, modal sosial, dan modal material-teknologikal.** **Modal spiritual** adalah seperangkat nilai yang menubuh dalam kedirian Manusia Indonesia, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan diri, empati, penerimaan dan penghormatan atas keragaman Indonesia. Bangsa merdeka membutuhkan harga diri kolektif, kesadaran fitrah manusia, dan tujuan moral bersama. Tanpa itu, rakyat kehilangan kompas batin. Mereka merdeka secara hukum, tetapi tidak merdeka secara jiwa. **Modal sosial**, terletak pada kerekatan kolektif kita sebagai sesama anak bangsa yang memiliki kepercayaan pada sesama, tolong menolong antar sesama, dan saling bertanggung jawab bagi kebaikan bersama. Tanpa modal sosial, kemerdekaan hanya menjadi slogan, bukan energi kolektif. **Modal material-teknologikal** merupakan sumberdaya yang kita miliki, terukur dan tak terukur, terbatas dan tak terbatas, dalam bentuk karunia alam dan anugerah daya pikir. Kemerdekaan membutuhkan kapasitas material. Jika orang sibuk bertahan hidup, tidak punya akses pendidikan, tidak punya jaminan sosial, maka sulit bagi mereka untuk berpikir merdeka.
- 3. Pembangunan Indonesia hendaknya tidak meniru pola penjajahan lama. Indonesia tidak boleh menjadi ruang bagi kolonialisme baru.** Tanah sebagai ruang hidup rakyat, terutama hak ulayat dan tanah adat tidak boleh dieksploitasi apalagi dirampas hanya atas nama pembangunan dan investasi.
- 4. Pembangunan Indonesia harus dilakukan secara gotong royong dengan membuka ruang bagi andil seluruh anak bangsa.** Pemerintah tidak boleh mengebiridan menutup ruang bagi inisiatif dan partisipasi Masyarakat untuk membangun kebangsaan Indonesia.
- 5. Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada Ekonomi Merdeka yang inovatif, inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan. Ekonomi nasional dijalankan dengan berbasis pengetahuan (knowledge based economy), bukan semata ekonomi**

berbasis sumber daya material (resources based economy) untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bersama anak bangsa secara berkelanjutan.

Dalam pandangan Aliansi Kebangsaan, untuk membangun manusia merdeka sebagai sebuah proyek peradaban, perlu menyusun arsitektur gerakan yang bekerja pada tiga lapisan, yaitu: jiwa, sistem, dan kapasitas hidup. Dengan dasar negara Pancasila, membentuk manusia Indonesia Merdeka adalah agenda membangun peradaban Indonesia pada tiga ranah, yaitu ranah tata nilai untuk membebaskan pikiran dan moral, ranah tata kelola untuk membebaskan peran dan relasi sosial, dan ranah tata sejahtera untuk membebaskan kapasitas hidup.

Pertama, dalam ranah tata nilai, kita harus membentuk manusia Merdeka yang memiliki fondasi kemerdekaan terdalam, yaitu kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan jiwa, bahwa manusia Indonesia mesti memiliki kesadaran diri sebagai subjek moral, bukan objek kekuasaan. Manusia Merdeka memiliki keberanian dan kemandirian untuk berpikir kritis, tidak takut bertanya, tidak takut berbeda, tidak tunduk pada dogma. Manusia Indonesia Merdeka memiliki orientasi pada kebenaran dan keadilan: bukan sekadar patuh aturan, tetapi lebih patuh pada nilai. Manusia Indonesia Merdeka memiliki harga diri kolektif: yakin bahwa bangsa Indonesia setara dengan bangsa mana pun.

Pada ranah tata Kelola, manusia Merdeka adalah warga Negara. Tata kelola membentuk peran sosial dan politik manusia Indonesia untuk menjadi agensi sebagai warga negara setara (*equal citizen*) yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan arah negara. Manusia Indonesia Merdeka berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, memiliki kemandirian dalam mengambil Keputusan, tidak bergantung pada patron, elite, atau birokrasi. Pada ranah Tata Kelola warga negara mesti didorong untuk memiliki kemampuan mengorganisasi diri mulai dari komunitas kecil hingga gerakan sosial.

Pada ranah Tata Sejahtera, manusia Indonesia mesti didorong untuk memiliki kemerdekaan secara material. Kemerdekaan batin dan sosial tidak akan bertahan tanpa kapasitas material. Pada ranah Tata Sejahtera, manusia dan bangsa Indonesia harus didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi agar tidak terjebak dalam kemiskinan struktural. Ranah Tata Sejahtera harus membuka akses pada pendidikan dan kesehatan bermutu merupakan syarat dasar untuk berpikir dan bertindak merdeka, memiliki kemampuan produktif dan inovatif bukan hanya bekerja, tetapi mencipta, memiliki keamanan sosial yang memadai dan tidak dihimpit ketakutan akan masa depan. Dalam ranah ini, manusia Merdeka mesti dibentuk melalui penguasaan teknologi dan pengetahuan, fondasi menuju ekonomi berbasis ilmu.

Kedua, pada ranah tata nilai urgen dilakukannya pembebasan pikiran dan moral dengan membangun kesadaran kebangsaan baru yang tidak terkungkung melalui: a) gerakan literasi kebangsaan yang menekankan keberanian berpikir, bukan hafalan sejarah, b) dialog

publik lintas generasi untuk memulihkan harga diri kolektif, dan c) narasi kebangsaan yang memerdekakan—bukan narasi ketakutan atau konflik yang melemahkan dan merenggangkan ikatan kebangsaan. Pembebasan pikiran dan moral juga mesti dilakukan dengan pendidikan karakter merdeka, melalui a) kurikulum untuk membentuk nilai integritas, keberanian moral, nalar kritis dan gotong royong, b) pelatihan guru sebagai agen pembebasan, bukan sekadar pengajar, dan c) komunitas belajar warga untuk membangun budaya refleksi. Selain itu, pembebasan pikiran dan moral juga harus dilakukan dengan memulihkan spiritualitas kebangsaan, melalui a) pembangunan ruang-ruang kontemplasi publik: forum renungan kebangsaan dan b) gerakan etika publik berupa kejujuran, tanggung jawab, dan martabat manusia.

Dalam Ranah Tata Kelola, kita harus melakukan pembebasan peran sosial dan politik, melalui: a) membangun warga sebagai subjek, bukan objek, b) program *civic empowerment* dalam bentuk pelatihan hak warga, advokasi, dan partisipasi, c) sekolah kepemimpinan rakyat untuk membentuk pemimpin yang merdeka batin, d) gerakan komunitas mandiri: warga mengorganisasi diri tanpa patron. Pembebasan peran sosial politik juga mesti dilakukan dengan mereformasi budaya Institusi, melalui pembentukan etika pelayanan publik dalam bentuk birokrasi yang memerdekakan, bukan menundukkan, transparansi dan akuntabilitas sosial berbasis komunitas, serta memperbanyak forum-forum musyawarah kebangsaan sebagai ruang deliberasi lintas sektor. Selain itu, pembebasan peran sosial dan politik mesti dilakukan dengan penguatan modal sosial melalui a) gerakan gotong royong modern: kolaborasi berbasis teknologi dan komunitas, b) membangun jembatan sosial lintas identitas untuk merawat persatuan, dan c) membangun ekosistem kolaborasi nasional: kampus, ormas, komunitas, dunia usaha.

Pada ranah tata sejahtera, kita harus melakukan pembebasan kapasitas hidup dengan membangun kemandirian ekonomi rakyat, melalui program ekonomi berbasis komunitas: a) koperasi modern, b) UMKM inovatif, c) akses modal dan teknologi untuk rakyat kecil, dan d) ekonomi pengetahuan: membangun kapasitas inovasi rakyat. Pembebasan kapasitas hidup juga harus dilakukan dengan pendidikan dan kesehatan sebagai hak pembebasan, melalui: a) akses pendidikan bermutu untuk semua lapisan, b) layanan kesehatan preventif agar rakyat tidak hidup dalam ketakutan, dan c) gerakan literasi digital untuk menghadapi era teknologi. Pembebasan kapasitas hidup juga mesti dilakukan dengan membangun jaminan sosial yang memungkinkan, melalui: a) skema perlindungan sosial adaptif agar rakyat berani mengambil risiko, dan b) program peningkatan keterampilan hidup, antara lain vokasi, digital, dan kewirausahaan.

***Ketiga*, dibutuhkan pembangunan mendasar pada kemauan politik (*political will*) dan kebijakan (*policy*) penyelenggara negara untuk membangun peradaban bangsa berdasarkan Pancasila pada ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera tersebut. Membangun negara**

Indonesia (*state building*) sekaligus membangun bangsa Indonesia (*nation building*) mesti dimulai dari kehendak politik para penyelenggara negara melalui pembentukan kebijakan dasar yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan negara, namun juga berorientasi pada pembangunan bangsa dengan membangun manusia Indonesia yang Merdeka, sehingga negara Indonesia yang dimerdekakan oleh para pendirinegara-bangsa melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak diselenggarakan dengan keterjajahan mental-jiwa manusia dan bangsa Indonesia, sebaliknya dengan memerdekakan manusia dan bangsa Indonesia sekaligus dengan kembali kepada fitrah cita negara.

Negara-bangsa Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Indonesia hanya mengidap kekurangan keberanian mental untuk menjadi Manusia dan Bangsa yang sepenuhnya Merdeka. Tanpa pembebasan mental, kemerdekaan Indonesia akan terus rapuh dan pembangunan akan kehilangan arah. Harus disadari bahwa Indonesia merdeka sebagai negara, tetapi belum merdeka sebagai bangsa. Karenanya, pembentukan manusia Indonesia yang berfikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka menjadi sebuah keniscayaan yang harus terus diperjuangkan untuk mengembalikan bangsa ini pada jati dirinya yaitu bangsa yang “merdeka lahir batin”.






Inilah inti dari gagasan “Aliansi Kebangsaan sebagai wadah perjuangan kaum cendekiawan” untuk kembali ke fitrah cita Negara yang selama ini diperjuangkan. Saatnya para cendekiawan bicara. Saatnya seluruh anak bangsa berhenti menjadi peniru, pecundang, atau penonton. Saatnya **berpikir, bersikap, dan bertindak MERDEKA**, demi masa depan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi masa depan Indonesia yang sepenuhnya Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. []

Jakarta, 2 Februari 2026
Ketua Aliansi Kebangsaan

Pontjo Sutowo



Media :

-  [aliansi_kebangsaan](#)
-  [Jaring Cendekia](#)
-  [Forum Kebangsaan](#)
-  [Tiga Ranah Pancasila](#)
-  [Aliansi Kebangsaan](#)

Narahubung :
Indri Ayu - 0812 9025 4794

Alamat Sekretariat :
Residence 2 Lt. 2 Komplek Hotel Sultan Jl. Gatot
Subroto, Jakarta 10270
Telp : 021-5704632/33
Email : kontak@aliansikebangsaan.org
Website : www.aliansikebangsaan.org